

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL
TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

***THE INFLUENCE OF LOCAL ORIGINAL REVENUE AND CAPITAL EXPENDITURE
ON THE LEVEL OF FINANCIAL INDEPENDENCE OF LOCAL GOVERNMENTS***

S.Puspita, N.Masnila, Sopiyan AR
Politeknik Negeri Sriwijaya

*Korespondensi : puspitasinta80@gmail.com

ABSTRACT

The fiscal independence of a region is a key indicator in assessing the ability of local governments to decrease their dependence on transfer funds to finance their activities independently, in line with the spirit of regional autonomy. The dependence of local governments on the central government will show the lower the level of financial independence. This study intends to investigate the factors that influence the level of regional financial independence in regencies / cities in Lampung Province through local revenue and capital expenditure both partially and simultaneously. The population and sample of the study involved all districts/cities in Lampung Province, which were obtained through a saturated sampling method. The data analyzed covers the period from 2021 to 2023, utilizing multiple linear regression analysis with SPSS software version 26: (1) Local Revenue has a significant positive influence on the Level of Regional Financial Independence, (2) Capital Expenditure has a significant negative influence on the Level of Regional Financial Independence, (3) Regional Original Revenue and Capital Expenditure simultaneously have a significant influence on the Level of Regional Financial Independence.

Keywords: Capital Expenditure, Independence Level, Regional Finance, Regional Original Income.

ABSTRAK

Kemandirian fiskal suatu daerah merupakan parameter kunci dalam menilai kapasitas pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer untuk membiayai aktivitas pemerintahannya secara mandiri, sebagaimana semangat otonomi daerah. Tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat mencerminkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Tujuan daripada studi ini guna mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, dengan fokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal, baik secara parsial maupun secara simultan. Populasi maupun sampel penelitian melibatkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yang dipilih melalui metode sampling jenuh. Data yang dianalisis mencakup periode tahun 2021 hingga 2023, dengan metode analisis regresi linier berganda menggunakan *software* SPSS versi 26. Hasil analisis mengungkapkan: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, (2) Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan (3) secara simultan, kedua variabel tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Kemandiri Keuangan.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah ialah hak, kewenangan, serta tanggung jawab suatu daerah otonom guna mengatur, mengelola, serta menyelenggarakan kepentingan pemerintahan serta masyarakatnya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama dari pelaksanaannya ialah guna mendorong efektivitas dan hasil pelaksanaan pemerintahan yang mandiri di tingkat lokal, terkhusus dalam hal pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan publik yang optimal, meskipun tetap berada dalam koridor pengawasan dan akuntabilitas kepada pemerintah pusat (Humaira, 2025).

Secara umum, otonomi daerah bertujuan guna memberi fleksibilitas kepada daerah dalam mengelola keuangan mereka sendiri, agar dapat menyesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan lokal masing-masing. Dengan demikian, pengelolaan keuangannya menjadi lebih tepat sasaran serta efisien. Daerah lebih mengerti kebutuhan spesifiknya serta dapat mengoptimalkan alokasi sumber dayanya. Hal ini berbeda dengan pendekatan sentralistik, di mana pengelolaan keuangan lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah pusat (Andriani, 2020).

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik secara independen, terutama dari kontribusi warga melalui pajak dan retribusi. Diharapkan melalui pelaksanaan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah dapat mencapai tingkat kemandirian fiskal yang memadai (Bella, 2022).

Derajat kemandirian suatu daerah juga menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Sebuah daerah dianggap mandiri jika mampu mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama dalam mendanai pengeluarannya, tanpa harus bergantung pada pinjaman atau bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat (Annisa, 2023). Tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dapat diukur melalui perbandingan antara PAD dan pendapatan

transfer dari pusat, (Pujihastuti, 2022). Meningkatnya kontribusi PAD cenderung menurunkan ketergantungan pada dana pusat.

Namun demikian, di Provinsi Lampung, banyak pemerintah daerah yang tingkat kemandiriannya masih tergolong sangat rendah. Rata-rata rasio kemandirian fiskal berada dalam kisaran 0%-25%, yang tergolong dalam kategori “sangat rendah”, (Kupastuntas.co, 2024). Tingkat hubungan antara kemandirian dan kapasitas fiskal daerah dapat dibedakan ke dalam empat kategori: hubungan instruktif (0–25%), konsultatif (>25–50%), partisipatif (>50–75%), dan delegatif (>75–100%), (Suwarno, 2017).

Rasio kemandirian keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi, sebagaimana ditunjukkan oleh perbandingan jumlah PAD yang masih rendah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Informasi lebih rinci tersaji pada Tabel 1:

Tabel 1. Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021-2023 (Dalam Persen)

Kabupaten/Kota	Tahun			Rata-Rata
	2021	2022	2023	
Kabupaten Lampung Barat	7,94%	7,47%	7,50%	7,64%
Kabupaten Lampung Selatan	18,82%	16,98%	18,34%	18,05%
Kabupaten Lampung Tengah	11,23%	9,13%	9,93%	10,10%
Kabupaten Lampung Timur	8,63%	10,39%	10,13%	9,72%
Kabupaten Lampung Utara	7,34%	4,44%	6,60%	6,12%
Kabupaten Mesuji	7,52%	8,87%	10,42%	8,93%
Kabupaten Pesawaran	7,55%	7,27%	7,83%	7,55%
Kabupaten Pesisir Barat	3,84%	3,92%	4,92%	4,23%
Kabupaten Pringsewu	10,37%	12,22%	13,20%	11,93%
Kabupaten Tanggamus	6,58%	4,56%	5,22%	5,46%
Kabupaten Tulang Bawang	10,44%	12,07%	10,90%	11,14%
Kabupaten Tulang Bawang Barat	5,84%	6,35%	6,35%	6,18%
Kabupaten Way Kanan	6,01%	6,24%	6,33%	6,19%
Kota Bandar Lampung	38,57%	42,27%	43,28%	41,37%
Kota Metro	42,51%	36,48%	41,90%	40,30%
Rata-Rata	12,88%	12,58%	13,52%	12,99%

Sumber: www.bpk.go.id Data diolah, 2025

Tabel tersebut memperlihatkan bahwasanya rata-rata rasio kemandirian

keuangan di lokasi penelitian hanya sebesar 12,99%, menempatkannya dalam kategori rendah. Terdapat tiga daerah yang memiliki rasio di atas rata-rata, yakni Kota Bandar Lampung (41,37%), Kota Metro (40,30%), dan Kabupaten Lampung Selatan (18,05%). Tingginya PAD suatu daerah akan meningkatkan kemandirian fiskalnya, dan sebaliknya, dan sebaliknya, (Amiranto, 2024).

Kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola PAD sangat menentukan tingkat kemandiriannya. Jika kontribusi PAD terhadap total pendapatan besar, berarti daerah tersebut semakin mampu berdiri secara mandiri. Namun, pada kenyataannya, kontribusi PAD di banyak daerah di Indonesia masih minim. Kondisi ini dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk pengelolaan sumber daya daerah yang belum optimal, (C. Setiawan, 2024). Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memaksimalkan pengelolaan berbagai potensi yang dimiliki guna meningkatkan PAD.

PAD ialah sumber pendapatan murni yang dimanfaatkan guna mendanai kegiatan pembangunan daerah serta meminimalkan ketergantungan terhadap dana pusat, (P. Setiawan et al., 2021). Masalah umum yang dihadapi adalah rendahnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, yang dipicu oleh faktor seperti minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya daya beli masyarakat, dan kebijakan pajak yang belum efektif, (Simarmata, 2020). Tabel 1.2 menampilkan realisasi PAD di Provinsi Lampung selama periode 2021–2023.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2021-2023 (Dalam Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun			Rata-Rata
	2021	2022	2023	
Kabupaten Lampung Barat	71.498,90	70.315,34	68.748,52	70.187,59
Kabupaten Lampung Selatan	295.717,86	310.575,87	347.290,20	317.861,31
Kabupaten Lampung Tengah	234.891,27	212.169,00	230.639,10	225.899,79
Kabupaten Lampung Timur	158.378,91	195.574,74	196.136,23	183.363,29
Kabupaten Lampung Utara	104.328,40	67.759,00	100.321,50	90.802,97
Kabupaten Mesuji	56.989,69	69.568,34	79.381,98	68.646,67
Kabupaten Pesawaran	81.674,50	82.092,00	88.037,73	83.934,74
Kabupaten Pesisir Barat	28.360,23	29.045,92	36.026,85	31.144,33
Kabupaten Pringsewu	113.827,10	132.228,90	138.012,10	128.022,70
Kabupaten Tanggamus	95.786,63	70.451,72	76.816,28	81.018,21
Kabupaten Tulang Bawang	106.614,73	128.693,24	125.682,60	120.330,19
Kabupaten Tulang Bawang Barat	46.579,00	51.532,96	51.184,79	49.765,58
Kabupaten Way Kanan	70.125,34	77.242,58	79.453,56	75.607,16
Kota Bandar Lampung	564.289,60	645.965,40	694.676,20	634.977,07
Kota Metro	273.845,00	239.837,89	284.262,96	265.981,95
Rata-Rata	153.527,14	158.870,19	173.111,37	161.836,24

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa PAD kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih berfluktuasi. Sejumlah daerah menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun, seperti Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Bandar Lampung. Peningkatan PAD tersebut memberi peluang kepada daerah guna mendanai pengeluarannya sendiri, sehingga menurunkan ketergantungan pada dana pemerintah pusat.

Belanja modal, sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, merupakan pengeluaran untuk menambah aset tetap yang memiliki manfaat jangka panjang (Indriani et al., 2023). Belanja ini meliputi pembelian peralatan bangunan, tanah, serta aset tak berwujud. Idealnya, belanja modal dimanfaatkan guna membangun infrastruktur dan fasilitas publik yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Informasi rinci mengenai belanja modal tersaji pada Tabel 1.3:

Tabel 3. Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2021-2023 (Dalam Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun			Rata-Rata
	2021	2022	2023	
Kabupaten Lampung Barat	132.249,60	191.561,29	117.007,40	146.939,43
Kabupaten Lampung Selatan	254.313,00	373.814,70	255.416,40	294.514,70
Kabupaten Lampung Tengah	355.715,74	398.502,70	313.421,10	355.879,85
Kabupaten Lampung Timur	228.354,16	186.716,32	188.842,37	201.304,28
Kabupaten Lampung Utara	116.686,23	281.624,82	156.611,28	184.974,11
Kabupaten Mesuji	140.377,17	137.860,27	126.058,70	134.765,38
Kabupaten Pesawaran	138.764,30	176.775,77	160.708,90	158.749,66
Kabupaten Pesisir Barat	206.773,87	217.250,28	155.905,94	193.310,03
Kabupaten Pringsewu	218.624,20	151.191,26	118.733,12	162.849,53
Kabupaten Tanggamus	175.685,00	259.900,90	133.059,70	189.548,53
Kabupaten Tulang Bawang	111.164,34	136.467,80	175.355,10	140.995,75
Kabupaten Tulang Bawang Barat	243.451,00	148.356,33	104.552,28	165.453,20
Kabupaten Way Kanan	111.164,34	109.116,14	107.713,49	109.331,32
Kota Bandar Lampung	400.783,89	424.750,98	322.688,30	382.741,06
Kota Metro	128.278,30	92.402,54	104.766,93	108.482,59
Rata-Rata	197.492,34	219.086,14	169.389,40	195.322,63

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 1.3 menunjukkan jika belanja modal tahun 2021 sampai tahun 2023 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung masih mengalami fluktuasi dengan rata-rata realisasi belanja modal Rp 195.322,63. Daerah dengan rata-rata belanja modal tertinggi yaitu, Kota Bandar Lampung, yakni Rp 382.741,06, Kabupaten Lampung Tengah dengan belanja modal Rp 355.879,85, dan Kabupaten Lampung Selatan dengan belanja modal Rp 294.514,70. Besarnya belanja modal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur demi kepentingan publik.

Infrastruktur dan fasilitas umum yang dibangun melalui belanja modal harapannya mampu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan PAD. Namun kenyataannya, alokasi belanja modal di beberapa daerah masih relatif kecil, dan sebagian besar anggaran justru digunakan untuk belanja lain yang bersifat rutin. Penelitian ini merupakan replikasi dari studi-studi terdahulu, dengan hasil yang beragam. Sebagian studi menemukan bahwasanya PAD memengaruhi kemandirian keuangan daerah secara

signifikan (Humaira, 2025), sementara studi lain menyatakan sebaliknya (Kusmila, 2023). Demikian pula, hasil terkait pengaruh belanja modal juga menunjukkan perbedaan pendapat antarpeneliti (Indriani, 2023; Riyadi, 2022).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif, yakni pendekatan yang berfokus pada data numerik serta pengolahan data secara statistik. Metode ini sering disebut pendekatan positivistik sebab berpijak pada filsafat positivisme, yang mengedepankan aspek-aspek ilmiah seperti empiris, terukur, objektif, rasional, dan sistematis (Sugiyono, 2023). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kuantitatif dipakai untuk mengkaji sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Penelitian dilaksanakan pada seluruh wilayah administratif di Provinsi Lampung, yang mencakup 13 kabupaten dan 2 kota. Data yang dimanfaatkan adalah data sekunder dari situs resmi E-PPID BPK, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Periode waktu yang diteliti mencakup tahun 2021 hingga 2023. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Variabel dependen (Y): Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Variabel independen (X): terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Belanja Modal (X2).

Lebih lanjut, definisi operasional tiap tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri dari kontribusi masyarakat dalam bentuk pajak dan retribusi	$\frac{PAD}{Total\ Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	Pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber legal daerah, termasuk pajak, retribusi, dan pendapatan sah lainnya	Log Total Pendapatan Asli Daerah	Rasio
Belanja Modal (X ₂)	Pengeluaran daerah untuk akuisisi aset tetap seperti tanah, gedung, bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud yang memberikan manfaat jangka panjang	Log Total Belanja Modal	Rasio

Sumber: Data diolah, 2025

Populasi ini melibatkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sebanyak 15 daerah administratif. Rincian daerah yang menjadi populasi tersaji dalam Tabel 2.2:

Tabel 5. Populasi Penelitian

No	Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Lampung Barat
2.	Kabupaten Lampung Selatan
3.	Kabupaten Lampung Tengah
4.	Kabupaten Lampung Timur
5.	Kabupaten Lampung Utara
6.	Kabupaten Mesuji
7.	Kabupaten Pesawaran
8.	Kabupaten Pesisir Barat
9.	Kabupaten Pringsewu
10.	Kabupaten Tanggamus
11.	Kabupaten Tulang Bawang
12.	Kabupaten Tulang Bawang Barat
13.	Kabupaten Way Kanan
14.	Kota Bandar Lampung
15.	Kota Metro

Sumber: Data diolah, 2025

Sampel penelitian ini dipilih melalui metode sampel jenuh, artinya seluruh anggota populasi dimanfaatkan sebagai sampel. Penelitian ini mengadopsi teknik analisis regresi linier berganda guna menilai tingkat pengaruh variabel independen (PAD dan Belanja Modal) terhadap variabel dependen (Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah). Persamaan regresi linier berganda yang dipakai adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, jumlah observasi penelitian sebanyak 45. Penelitian ini melibatkan dua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal, serta satu variabel dependen yakni Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Rangkuman dari hasil statistik deskriptif untuk ketiga variabel tersebut diperlihatkan di Tabel 6:

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	45	10,45	11,84	11,0699	,33750
Belanja Modal	45	10,97	11,63	11,2507	,18357
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	45	,04	,43	,1293	,11600
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Output data diolah SPSS 26, 2025

Tabel tersebut memperlihatkan bahwasanya:

1. Pendapatan Asli Daerah (X₁) memperlihatkan nilai minimum 10,45 dan nilai maksimum 11,84, dengan rata-rata 11,0699. Nilai standar deviasi yang diperoleh sebesar 0,33750.
2. Belanja Modal (X₂) memperlihatkan nilai minimum 10,97 dan maksimum 11,63. Rata-rata dari variabel ini sebesar 11,2507 dengan standar deviasi 0,18357.
3. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y) menunjukkan nilai minimum 0,04 dan maksimum 0,43, dengan rata-rata 0,1293 dan standar deviasi sebesar 0,11600.

Analisis Regresi Linear Berganda

Ghozali (2021) menyebutkan bahwasanya regresi linier berganda diterapkan dalam analisis yang melibatkan banyak variabel bebas guna memperkirakan nilai variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya yakni Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sementara variabel bebasnya ialah PAD dan Belanja Modal. Rumus model regresi yang dipakai yakni:

$$Y = \alpha + \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Hasil pengolahan data melalui SPSS menghasilkan nilai-nilai koefisien yang diperlihatkan di Tabel 7 :

Tabel 3.2
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,728	,637		-2,713	,010
	Pendapatan Asli Daerah	,307	,035	,893	8,863	,000
	Belanja Modal	-.137	,064	-.217	-2,150	,037

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Output data diolah SPSS 26, 2025

Dari tabel tersebut didapati persamaan regresi linier berganda berikut:

Interpretasi Koefisien:

$$Y = -1,728 + 0,307 - 0,137$$

1. Interpretasi Konstanta ($\alpha = -1,728$)
Konstanta menunjukkan nilai Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) ketika seluruh variabel independen—dalam hal ini log PAD dan log Belanja Modal bernilai nol. Maknanya Jika PAD dan Belanja Modal berada pada titik dasar ($\log = 0$), maka TKKD diperkirakan bernilai $-1,728$. Nilai negatif ini tidak diartikan secara literal sebagai kemandirian yang “minus”, tetapi lebih sebagai nilai dasar model ketika variabel-variabel penjelas belum berkontribusi. Dalam konteks regresi logaritmik, konstanta lebih berfungsi sebagai titik awal perhitungan, bukan sebagai nilai yang memiliki makna substantif.

2. Interpretasi Koefisien PAD ($\beta_1 = 0,307$)
Koefisien ini menunjukkan pengaruh log PAD terhadap TKKD, dengan asumsi variabel lain konstan. Maknanya Ketika log PAD meningkat satu satuan, maka TKKD meningkat sebesar 0,307. Dalam bentuk

persentase, peningkatan satu satuan log PAD meningkatkan TKKD sebesar 30,7%. Implikasi substantif yaitu PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya, semakin besar kemampuan daerah menghasilkan PAD, semakin mandiri daerah tersebut dalam membiayai kebutuhan fiskalnya tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Ini sejalan dengan teori keuangan daerah dimana PAD adalah indikator utama kemandirian fiskal.

3. Interpretasi Koefisien Belanja Modal ($\beta_2 = -0,137$)

Koefisien ini menunjukkan pengaruh log Belanja Modal terhadap TKKD, dengan asumsi variabel lain konstan. Maknanya Ketika log Belanja Modal meningkat satu satuan, maka TKKD menurun sebesar 0,137. Dalam bentuk persentase, peningkatan satu satuan log Belanja Modal menurunkan TKKD sebesar 13,7%. Implikasi substantif: Belanja Modal memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Interpretasi ini dapat dijelaskan melalui beberapa kemungkinan:

1. Belanja Modal masih dibiayai oleh transfer pusat, bukan dari PAD. Artinya, peningkatan belanja modal justru menunjukkan ketergantungan pada dana pusat.
2. Belanja Modal belum menghasilkan pendapatan daerah (belum produktif). Infrastruktur yang dibangun belum memberikan kontribusi langsung terhadap PAD.
3. Struktur fiskal daerah masih berat pada belanja wajib, sehingga belanja modal tidak mencerminkan kemampuan fiskal daerah.

Dengan demikian, peningkatan belanja modal tidak otomatis meningkatkan kemandirian fiskal, terutama jika sumber dananya bukan berasal dari PAD.

Model regresi menunjukkan bahwa:

1. PAD berperan positif dan kuat dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
2. Belanja Modal justru berpengaruh negatif, yang mengindikasikan bahwa belanja modal belum sepenuhnya

mencerminkan kemampuan fiskal daerah, atau masih bergantung pada dana transfer pusat.

Secara keseluruhan, model ini menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah menggali PAD, bukan oleh besarnya belanja modal yang dikeluarkan.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji-t)

Tujuan dari uji ini guna mengidentifikasi pengaruh variabel independen secara terpisah pada variabel Hasil uji statistik t (uji parsial) memperlihatkan bahwasanya:

1. Untuk PAD (X_1), diperoleh t_{hitung} 8,863 > t_{tabel} 1,681 dan nilai signifikansi < 0,05, mengarahkan pada penerimaan H_1 . Artinya PAD memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara positif signifikan.
2. Untuk Belanja Modal (X_2), t_{hitung} adalah -2,150 dan t_{tabel} tetap 1,681. Meski koefisiennya negatif, nilai signifikansi < 0,05, mengarahkan pada penerimaan H_2 . Artinya, Belanja Modal memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara negative signifikan.

Uji Simultan (Uji-F)

Pengujian simultan diterapkan guna mengidentifikasi apakah PAD dan Belanja Modal secara simultan memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Tabel 9
Hasil Uji Simultan (Uji-F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,394	2	,197	41,716	,000 ^b
	Residual	,198	42	,005		
	Total	,592	44			

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output data diolah SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel 3.4, nilai F_{hitung} adalah 41,716 > F_{tabel} 3,220 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Artinya PAD dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh

dependen. Kriteria pengujian yakni H_0 ditolak jika nilai signifikansi < 0,05 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Tabel 8
Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1,728	,637		-2,713	,010
	Pendapatan Asli Daerah	,307	,035	,893	8,863	,000
	Belanja Modal	-,137	,064	-,217	-2,150	,037

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Output data diolah SPSS 26, 2025
signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dimanfaatkan guna menilai tingkat kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi pada variabel terikat dalam model.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,816 ^a	,665	,649	,06870	1,502

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Output data diolah SPSS 26, 2025

Mengikuti tabel 4.9, nilai *Adjusted* R^2 memperlihatkan uji koefisien determinasi 0,649 atau 64,9%, artinya persentase sumbangan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal sebesar 64,9% sementara 35,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian.

Pembahasan Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti akan menguraikan dan menjelaskan berpengaruh atau tidaknya antara variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung secara parsial dan simultan. Pembahasan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji-t menunjukkan bahwasanya nilai $t_{hitung} 8,863 > t_{tabel} 1,681$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, mengarahkan pada penerimaan H1. Artinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Ini menandakan bahwasanya besarnya PAD di suatu daerah mencerminkan tingginya kemampuan daerah tersebut dalam mendanai kebutuhannya secara independen.

Pendapatan asli daerah termasuk di antara sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah yang menggambarkan sejauh mana dalam suatu daerah mampu membiayai kebutuhannya sendiri terutama pada sektor pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Penerimaan ini mayoritas didapat dari pajak daerah dan retribusi, yang mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan meningkatnya PAD menunjukkan besarnya kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur tanpa harus terlalu mengandalkan dana pemerintah pusat.

Temuan ini didukung oleh Nurkhayati (2022), yang juga mengungkapkan bahwasanya PAD memengaruhi kemandirian keuangan daerah secara positif signifikan. Namun, lain dengan temuan Kusmila (2023) yang mengungkapkan bahwasanya PAD tidak memberikan pengaruh signifikan pada tingkat kemandirian keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar PAD yang berhasil dihimpun oleh pemerintah daerah, semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri tanpa ketergantungan berlebihan

pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam konteks Provinsi Lampung, hasil ini sangat relevan mengingat struktur ekonomi daerah yang cukup beragam mulai dari sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, hingga pariwisata. Daerah-daerah seperti Bandar Lampung dan Metro yang memiliki basis ekonomi lebih kuat cenderung menunjukkan tingkat PAD yang lebih tinggi, sehingga lebih mampu menggerakkan roda pembangunan secara independen. PAD pada dasarnya mencerminkan kapasitas fiskal daerah. Ketika pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset mampu memberikan kontribusi signifikan, hal itu menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi lokal berjalan dinamis dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Di Lampung, peningkatan PAD dapat menjadi indikator bahwa sektor-sektor unggulan seperti perkebunan, perdagangan, dan pariwisata mulai memberikan dampak nyata terhadap penerimaan daerah. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa upaya memperkuat PAD melalui intensifikasi pajak, ekstensifikasi basis pajak, serta optimalisasi aset daerah merupakan langkah strategis untuk mendorong Lampung menuju kemandirian fiskal yang lebih kokoh.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Dari hasil uji-t, didapati nilai $t_{hitung} -2,150$ dengan nilai signifikansi $0,037 < 0,05$. Meski nilai t_{hitung} bertanda negatif, namun karena nilainya lebih besar dari t_{tabel} secara absolut ($-2,150 > 1,681$), maka hipotesis kedua (H2) juga diterima. Artinya, Belanja Modal memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara negatif signifikan.

Temuan ini diperkuat oleh temuan Fitriyani (2021), yang juga menemukan bahwasanya Belanja Modal memengaruhi kemandirian keuangan daerah secara negatif signifikan. Sebaliknya, temuan ini bertentangan dengan studi Rahmawati (2023), yang menyebutkan bahwasanya belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat kemandirian keuangan. Berbeda dengan PAD, belanja

modal justru menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Temuan ini memberikan sinyal bahwa pengalokasian belanja modal di Provinsi Lampung belum sepenuhnya diarahkan pada kegiatan yang produktif dan berorientasi jangka panjang. Idealnya, belanja modal digunakan untuk membangun aset-aset strategis yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, seperti infrastruktur publik, fasilitas pariwisata, pasar daerah, atau sarana pendukung industri. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian belanja modal di Lampung masih bersifat konsumtif atau tidak menghasilkan pendapatan daerah secara langsung. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh beberapa kondisi yang sering terjadi di daerah-daerah di Lampung. Pertama, sebagian besar belanja modal masih dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga peningkatan belanja modal justru mencerminkan ketergantungan pada pemerintah pusat, bukan kemandirian fiskal. Kedua, banyak aset yang dibangun melalui belanja modal tidak dikelola secara optimal sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap PAD. Ketiga, perencanaan proyek belanja modal sering kali tidak mempertimbangkan potensi pengembalian ekonomi, sehingga belanja modal menjadi beban biaya pemeliharaan tanpa menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, pengaruh negatif belanja modal dalam penelitian ini menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola, perencanaan, dan evaluasi belanja modal di Lampung agar benar-benar mampu mendorong kemandirian fiskal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil uji F mendapati nilai F_{hitung} 41,716 > F_{tabel} 3,220 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, megarahkan pada penerimaan H_3 , yang berarti bahwa PAD dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan pada Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Ini menandakan bahwasanya kombinasi antara besarnya penerimaan PAD dan strategi pengeluaran

melalui belanja modal memegang peranan krusial dalam menentukan kapasitas suatu daerah untuk mandiri secara keuangan. Apabila PAD dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan guna membiayai belanja modal yang produktif, maka ketergantungan terhadap dana dari pusat dapat dikurangi.

Berdasarkan nilai Adjusted R^2 0,649 (64,9%), diketahui bahwasanya PAD dan Belanja Modal menjelaskan sekitar dua pertiga dari variasi kemandirian keuangan daerah. Sisanya, yakni 35,1%, dipengaruhi oleh faktor lain di luar studi ini. Dalam konteks teori stewardship, hasil ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas sumber daya yang dimiliki, guna memenuhi kepentingan publik dan mendorong peningkatan PAD, yang pada akhirnya mengarah pada pembiayaan belanja modal secara mandiri dan pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer. Ketika PAD dan belanja modal dianalisis secara simultan, keduanya terbukti berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan daerah, tetapi juga oleh bagaimana penerimaan tersebut dikelola dan dialokasikan melalui belanja modal. Dalam konteks Provinsi Lampung, hubungan simultan ini menegaskan bahwa peningkatan PAD harus diikuti dengan strategi belanja modal yang tepat sasaran agar mampu menciptakan siklus fiskal yang sehat: PAD meningkat, belanja modal produktif meningkat, dan pada akhirnya PAD kembali meningkat melalui aktivitas ekonomi yang tumbuh. Namun, karena belanja modal dalam penelitian ini berpengaruh negatif, maka sinergi antara PAD dan belanja modal di Lampung belum berjalan optimal. Artinya, meskipun PAD meningkat, belanja modal belum diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor yang dapat menghasilkan pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja. Dengan nilai Adjusted R^2 sebesar 64,9%, penelitian ini juga menegaskan

bahwa sebagian besar variasi kemandirian fiskal Lampung dapat dijelaskan oleh PAD dan belanja modal, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti efektivitas pengelolaan aset, kualitas SDM aparatur, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan struktur ekonomi daerah. Secara keseluruhan, temuan ini memberikan pesan penting bagi pemerintah daerah di Provinsi Lampung: kemandirian fiskal hanya dapat dicapai apabila PAD diperkuat dan belanja modal diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mampu menghasilkan pendapatan jangka panjang. Dengan demikian, Lampung dapat mengurangi ketergantungan pada dana pusat dan bergerak menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mengungkapkan bahwasanya:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Nilai signifikansi yang didapat di angka 0,000 menunjukkan bahwasanya pengaruh tersebut sangat kuat secara statistik. Artinya, besarnya PAD suatu daerah akan meningkatkan kemandirian keuangannya.
2. Belanja Modal memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, dengan nilai signifikansi 0,037. Temuan ini mengungkapkan bahwasanya meskipun belanja modal seharusnya mendukung peningkatan kapasitas daerah, dalam praktiknya masih belum sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap kemandirian keuangan.
3. Secara simultan, **PAD dan Belanja Modal** berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, yang dibuktikan oleh nilai signifikansi simultan $0,000 <$ batas signifikansi 0,05.

Saran

Merujuk pada kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan sejumlah saran yang bisa dimanfaatkan sebagai masukan dan bahan pertimbangan:

1. Pemerintah daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui perluasan basis pajak dan retribusi, peningkatan pelayanan publik, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal.
2. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan evaluasi yang mendalam terhadap efektivitas belanja modal, khususnya terkait perencanaan, pelaksanaan, dan dampak jangka panjang dari belanja tersebut terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian keuangan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), pertumbuhan ekonomi, atau indeks tata kelola daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Almas, A. B. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Daerah-Daerah Tertinggal di Indonesia dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2021)*. 38–46.
- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30–39.

- Bella, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(05), 675–683.
- Bukit, P. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 325.
- Cindi Oktavia, N. H. (2021). Pengaruh PAD, Tax Effort, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(2), 256–269.
- Debora, Kantohe, Tarore, R. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Ke Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administro*, 1(1), 05–09.
- Ema Nur Indah Fitriyani, A. E. S. (2021). *Pengaruh Pad, Dau, Belanja Modal, Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. 1(1), 61–69.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handraini, H., Frinald, A., Asnil, & Putri, N. (2022). ... Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sukoharjo. *JABE (Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi)*, 11(2), 593–600.
- Imel Oktaviani Pramesti, T. M. (2025). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*.
- Indra Tama, A., & Pujihastuti, I. (2022). *Determinan Kemandirian Keuangan pada Pemda Tingkat II di Provinsi Jawa Tengah*. 24(2), 261–276.
- Indriani, M. P., Wulandari, H. K., & Rahmawati, T. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Periode 2018-2022). *JACFIR: Journal of Accounting and Financial Research*, 1(4), 50–67.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan* (Diperbarui 2023). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Kupastuntas.co. (2024). *Kupastuntas.co*. <https://kupastuntas.co/2024/01/22/index-kemandirian-fiskal-pemda-di-lampung-masih-dibawah-25-persen>
- Kusmila, Z. (2023). Pengaruh Pad dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.
- Malau, E. I., & Simarmata, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3(2), 332–337.
- Misra Sarumaha, & Annisa Annisa. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2), 98–111.

- Nurkhayati, E. D. (2022). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sukoharjo*. 2011–2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 51–64.
- Setiawan, C. (2024). *Pengaruh tax effort , laju pertumbuhan ekonomi, dan rasio belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa barat tahun 2011-2021*.
- Setiawan, P., Widiyanti, R., Siregar, L. M., Nurhaida, N., & Oktavia, E. (2021). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(1), 44–53.
- Shafa Humaira, D. W. (2025). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Susanti, D. B., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2024). *Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014)*. 3(3), 3308–3314.
- Suwarno. (2017). *Kemandirian Keuangan Daerah* (Vol. 01, pp. 1–23).
- Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Wahyuni, E., & Ardini, L. (2019). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(6), 1–16.
- Wulan Riyadi. (2022). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat*. 3, 1–23.
- Yulkhaq, M., & Amiranto, J. . (2024). *Pengaruh Pendapatan asli daerah (PAD), Dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) Terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022*. 04(02), 64–75.